



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : THOMAS A. M. DJIWANDONO
- Jabatan** : WAKIL MENTERI
- NHK** : 976661

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 40.570.630.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 2.646 m²/274 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , Rp. 40.570.630.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 4.215.000.000

- MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.5 G AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
- MOBIL, HYUNDAI STARIA 2.2 2WD 8AT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 1.065.000.000
- MOBIL, LEXUS LEXUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 2.350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.809.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 13.073.600.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.829.031.234

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 74.497.761.234

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 74.497.761.234

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.